



Peran Pemerintah Desa dalam Menghadapi Perubahan Budaya Gotong Royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Riska Ratna Putri Lase Universitas Nias riskalase60@gmail.com</p> <p>Ayler Beniah Ndraha Universitas Nias AylerBeniahNdraha@gmail.com</p> <p>Meiman Hidayat Waruwu Universitas Nias MeimanHidayatWaruwu@gmail.com</p> <p>Robin Markus Putra Waruwu Universitas Nias RobinMarkusPutraWaruwu@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Lase, R. R. P., Ndraha, A. B., Waruwu, M. H., & Waruwu, R. M. P. (2025). Peran Pemerintah Desa dalam Menghadapi Perubahan Budaya Gotong Royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 3333-3342.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam mempertahankan budaya gotong royong di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, di tengah tantangan modernisasi, migrasi, serta perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi desa serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak utama dalam menjaga keberlangsungan gotong royong. Upaya yang dilakukan antara lain melalui musyawarah desa, pemberian insentif, pemanfaatan teknologi komunikasi, kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, serta integrasi kegiatan gotong royong dengan program pembangunan desa. Meskipun budaya gotong royong menghadapi tantangan berupa menurunnya partisipasi generasi muda, migrasi tenaga produktif, serta dominasi nilai individualistik, pemerintah desa mampu menerapkan strategi adaptif yang sejalan dengan teori perubahan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada kajian kepemimpinan partisipatif dan community development, serta implikasi praktis bagi penguatan kebijakan pembangunan berbasis budaya lokal. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya menjadi warisan tradisi, tetapi juga instrumen pembangunan desa berkelanjutan yang relevan dalam menghadapi dinamika globalisasi.

Kata Kunci: Gotong Royong, Pemerintah Desa, Perubahan Sosial, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in preserving the culture of mutual cooperation in Hiligara Village, South Gunungsitoli District, amid the challenges of modernization, migration, and socio-economic changes in the community. The study uses a qualitative approach with descriptive methods, where primary data is obtained through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, while secondary data is sourced from official village documents and related scientific literature. The results show that the village government has a strategic role as a facilitator, motivator, and main driver in maintaining the continuity of mutual cooperation. Efforts made include village deliberations, provision of incentives, utilization of communication technology, collaboration with traditional leaders and religious leaders, and integration of mutual cooperation activities with village development programs. Although the culture of mutual cooperation faces challenges in the form of declining participation of the younger generation, migration of productive workers, and the dominance of individualistic values, the village government is able to implement adaptive strategies in line with social change theory. This research contributes theoretically to the study of participatory leadership and community development, as well as providing practical implications for strengthening local culture-based development policies. Thus, mutual cooperation is not only a traditional heritage, but also an instrument of sustainable village development that is relevant in facing the dynamics of globalization.

Keywords: Gotong Royong, Village Government, Social Change, Community Participation, Sustainable Development.

A. Pendahuluan

Gotong royong merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi ciri khas kehidupan sosial masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Sebagai bentuk solidaritas dan kerja sama, gotong royong berfungsi menjaga kohesi sosial, memperkuat jaringan solidaritas, serta menopang kemandirian komunitas lokal (Arief & Yuwanto, 2023). Nilai ini tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga berakar dalam falsafah Pancasila yang menekankan musyawarah, keadilan, dan kekeluargaan (Marhayati, 2021). Dengan demikian, gotong royong bukan semata praktik sosial, melainkan identitas nasional yang mencerminkan keutuhan kebangsaan Indonesia. Namun, perkembangan globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup masyarakat. Perubahan ini mendorong lahirnya kecenderungan individualisme yang kian mengikis semangat kebersamaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa nilai gotong royong semakin melemah, terutama di kalangan generasi muda, karena lebih memilih aktivitas berbasis teknologi daripada keterlibatan dalam kegiatan sosial (Eliyani, 2023; Rifaldi, Hidayatissalam, & Turnip, 2023). Fenomena ini berimplikasi pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang dulunya sangat bergantung pada kerja kolektif (Iswanto, 2021).

Pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan terdekat dengan masyarakat memiliki peran krusial dalam menjaga dan merevitalisasi nilai gotong royong. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, menegaskan bahwa desa berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang diakui negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah desa bukan sekadar penyelenggara administrasi, tetapi juga aktor utama dalam melestarikan budaya lokal dan membangun partisipasi warga (Nugroho & Lestari, 2023; Kurniasih, 2023). Dalam praktiknya, semakin sering dijumpai penurunan antusiasme masyarakat untuk bergotong royong. Misalnya, kegiatan pembangunan jalan desa atau pembersihan lingkungan yang dulunya dikerjakan bersama, kini cenderung mengandalkan tenaga upahan atau proyek pemerintah. Situasi ini menandakan terjadinya pergeseran nilai sosial, di mana kepentingan pribadi lebih diutamakan dibanding kepentingan kolektif (Aulia, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, urbanisasi, dan migrasi juga mempercepat terjadinya pergeseran nilai ini (Lase, 2021; Pahriah et al., 2023).

Fenomena serupa juga terjadi di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Data Kementerian Desa PDTT (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 45% desa di Indonesia mengalami penurunan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong selama lima tahun

terakhir. Kondisi ini tercermin pula di Desa Hiligara, di mana kegiatan kerja bakti yang dulunya diikuti hampir seluruh warga kini hanya dihadiri oleh sebagian kecil masyarakat. Pudarnya semangat gotong royong tentu berdampak langsung pada efektivitas pembangunan desa, karena menurunnya keterlibatan masyarakat berpotensi menghambat kemandirian dan keberlanjutan pembangunan (Sari & Hidayat, 2023). Dalam konteks ini, peran pemerintah desa menjadi sangat penting. Pemerintah desa tidak hanya dituntut sebagai fasilitator penyedia sarana dan prasarana, tetapi juga sebagai motivator dan inovator yang mampu menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan nilai gotong royong, revitalisasi tradisi adat, penguatan peran tokoh lokal, serta integrasi gotong royong dalam program pembangunan partisipatif (Fusnika & Mia, 2022; Armadella, 2022). Upaya ini selaras dengan gagasan bahwa gotong royong dapat berfungsi sebagai modal sosial yang menguatkan partisipasi warga dan memperkuat demokrasi lokal (Pamungkas, Isawati, & Yuniyanto, 2022).

Dengan demikian, penelitian mengenai “Peran Pemerintah Desa dalam Menghadapi Perubahan Budaya Gotong Royong di Desa Hiligara Kecamatan Gunungsitoli Selatan” menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana pemerintah desa berperan dalam menjaga keberlangsungan nilai gotong royong, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan strategi untuk merevitalisasi semangat kebersamaan di tengah arus perubahan sosial. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam memperkuat pembangunan desa berbasis kearifan lokal.

B. Metodologi

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial mengenai peran pemerintah desa dalam menghadapi perubahan budaya gotong royong. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali makna, perspektif, serta pengalaman langsung dari subjek penelitian dalam konteks kehidupan sosial mereka (Huberman & Miles, 1994). Menurut Sugiyono (2018), penelitian kualitatif bertujuan untuk menafsirkan fenomena sosial berdasarkan makna yang diberikan oleh partisipan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada data kuantitatif, tetapi lebih menekankan interpretasi mendalam terhadap dinamika sosial di Desa Hiligara. Hal ini relevan dengan topik penelitian karena perubahan budaya gotong royong tidak dapat diukur semata-mata dengan angka, melainkan harus dipahami melalui interaksi sosial, nilai-nilai, dan praktik keseharian masyarakat. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti (Suryanto, 2019). Desain ini memungkinkan peneliti mendokumentasikan bagaimana pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, motivator, maupun penggerak masyarakat dalam melestarikan nilai gotong royong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul.

Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini dipilih karena masih mempertahankan praktik gotong royong, meskipun mengalami penurunan partisipasi akibat faktor modernisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial (Lase, 2021). Selain itu, lokasi ini relevan karena pemerintah desa aktif melaksanakan program pembangunan berbasis masyarakat, sehingga menjadi konteks yang ideal untuk mengkaji peran pemerintah dalam menghadapi perubahan budaya lokal. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Tahap persiapan mencakup studi literatur dan perizinan penelitian; tahap pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi; sementara tahap analisis dilaksanakan secara simultan dengan pengumpulan data hingga diperoleh temuan yang komprehensif (Sugiyono, 2019).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta warga Desa Hiligara yang terlibat dalam kegiatan gotong royong.

- b. Data Sekunder, berupa dokumen resmi desa (profil desa, peraturan desa, dan laporan kegiatan), literatur akademik terkait budaya gotong royong, serta data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2023).

Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data, sehingga hasil penelitian lebih valid dan reliabel (Soekanto, 2020).

Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek penelitian secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Informan utama terdiri dari:

- a. Kepala desa dan perangkat desa,
- b. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama,
- c. Warga yang aktif maupun kurang aktif dalam kegiatan gotong royong.

Teknik ini dipilih karena sesuai untuk penelitian kualitatif yang membutuhkan kedalaman informasi, bukan representasi statistik (Huberman & Miles, 1994).

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai human instrument (Sugiyono, 2018). Peneliti berfungsi merencanakan, mengumpulkan, menginterpretasi, dan menganalisis data. Untuk mendukung proses ini, digunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan perangkat dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara mendalam, dilakukan secara semi-terstruktur agar informan dapat menyampaikan pandangan secara terbuka (Suryanto, 2019).
- b. Observasi partisipatif, untuk mengamati langsung kegiatan gotong royong maupun interaksi sosial masyarakat.
- c. Dokumentasi, meliputi arsip desa, foto kegiatan, serta catatan musyawarah desa.

Teknik kombinasi ini dipilih untuk memperkuat triangulasi sumber data, sehingga meningkatkan keabsahan hasil penelitian (Huberman & Miles, 1994).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama:

- a. Reduksi Data, yaitu proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan.
- b. Penyajian Data, dengan menyusun informasi dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel agar mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga tahap akhir untuk menemukan pola, makna, dan implikasi (Huberman & Miles, 1994).

Proses analisis dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, sehingga temuan penelitian dapat terus diverifikasi dan dikembangkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Sejarah Singkat Lokus Penelitian

Desa Hiligara adalah nama sebuah wilayah di Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli. Desa Hiligara bermula dari sebuah kampung adat yang didirikan oleh seseorang yang bernama Ama Gamasi Lase alias Ngetumbanua (gelar Kepala Kampung Adat) pada masa koloni Belanda. Beliau mempunyai 3 (tiga) anak kandung, yaitu : Ama Gafaelu Lase, Ama Lidia Lase dan Ama Lona Lase. Setelah meninggalnya Ama Gamasi Lase maka gelar Kepala Kampung Adat diteruskan oleh anaknya yang paling tua atas nama Ama Gafaelu Lase alias Bawa Duha (gelar kepala kampung adat Hiligara) pada masa dulu. Pada masa pemeritahan koloni Belanda, maka dibentuklah sistem pemerintahan di desa dan yang terpilih sebagai kepala kampung pada saat itu adalah Ama Gafaelu Lase (Bawa Duha) yang sedang memimpin kampung Adat Hiligara dan sekaligus nama tersebut dipakai sebagai nama kampung pemerintahan di desa tersebut yaitu Kampung Hiligara (Desa Hiligara). Seiring dengan perkembangan zaman maka kampung pemerintahan yang dulunya dinamai Kampung Hiligara kemudian namanya beralih menjadi Desa Hiligara hingga saat ini.

Sejak dibentuknya pemerintahan kampung yang kemudian secara resmi dikenal dengan nama Desa Hiligara, struktur kepemimpinan di wilayah tersebut telah mengalami dinamika dan pergantian sebanyak 13 kali. Pada awalnya, pemimpin desa dikenal dengan sebutan Kepala Kampung, yang seiring perkembangan regulasi pemerintahan desa kemudian berubah penyebutannya menjadi Kepala Desa. Pergantian kepemimpinan ini tidak hanya mencerminkan kesinambungan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, tetapi juga menunjukkan adanya proses regenerasi kepemimpinan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pembangunan masyarakat desa.

Pelibatan Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong di Desa Hiligara mengalami fluktuasi. Pada kegiatan rutin seperti pembersihan lingkungan, hanya sebagian warga yang hadir. Namun, pada acara adat atau pembangunan rumah ibadah, tingkat partisipasi meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh konteks kegiatan. Menurut Pamungkas et al. (2022), gotong royong merupakan instrumen penting untuk memperkuat civic engagement. Namun, partisipasi warga tidak selalu konsisten karena dipengaruhi motivasi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menciptakan strategi yang lebih adaptif untuk menarik minat masyarakat.

Peran Tokoh Adat dan Lembaga Lokal

Tokoh adat dan agama berperan penting dalam menjaga semangat gotong royong. Kehadiran mereka dalam kegiatan sosial memberikan legitimasi moral yang mampu memotivasi masyarakat. Lembaga lokal seperti BPD juga berkontribusi dengan menyelenggarakan musyawarah desa yang mendorong keterlibatan warga. Penelitian Armadella (2022) menunjukkan bahwa tradisi adat dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat nilai gotong royong. Hal ini juga terjadi di Hiligara, di mana kegiatan adat masih menjadi wadah utama dalam mempertemukan masyarakat.

Kendala Ekonomi

Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor utama menurunnya partisipasi. Banyak warga yang lebih mengutamakan pekerjaan sehari-hari daripada mengikuti kerja bakti. Fenomena ini juga ditemukan oleh Lase (2021) dalam penelitian di masyarakat Nias, di mana faktor ekonomi mempercepat terjadinya pergeseran nilai gotong royong.

Pengaruh Teknologi

Perkembangan teknologi berimplikasi ganda. Di satu sisi, media sosial digunakan untuk menginformasikan jadwal kerja bakti. Namun, di sisi lain, masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di ruang digital dibanding kegiatan sosial nyata. Hal ini sejalan dengan temuan Eliyani (2023) yang menegaskan bahwa teknologi mampu menggeser pola interaksi masyarakat.

Migrasi, Urbanisasi, dan Perubahan Demografi

Migrasi dan urbanisasi menyebabkan banyak generasi muda meninggalkan desa untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan di kota. Akibatnya, jumlah tenaga kerja yang dapat terlibat dalam gotong royong berkurang. Sari & Hidayat (2023) menyebut fenomena ini sebagai salah satu tantangan terbesar dalam revitalisasi nilai gotong royong di era modernisasi.

Temuan Penting Penelitian

Temuan penting penelitian adalah bahwa gotong royong masih hidup di Desa Hiligara, tetapi mengalami transformasi. Partisipasi masyarakat lebih selektif, bergantung pada relevansi kegiatan dengan kebutuhan mereka. Pemerintah desa berhasil menjaga sebagian tradisi gotong royong, tetapi memerlukan strategi baru yang lebih kontekstual dengan perubahan sosial.

2. Pembahasan

Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci dan pendukung yang telah dianalisis secara tematik. Data lapangan dibandingkan dengan teori-teori yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka guna melihat konsistensi dan perbedaan. Dengan pendekatan ini, pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian sekaligus mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Peran Pemerintah Desa dalam Mempertahankan Budaya Gotong Royong

Perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi, teknologi, dan demografi. Dalam konteks tersebut, pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, motivator, sekaligus penggerak utama yang bertugas mempertahankan nilai-nilai kebersamaan masyarakat. Peran ini terlihat nyata dalam penyelenggaraan musyawarah desa yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam merencanakan kegiatan gotong royong. Pendekatan partisipatif semacam ini selaras dengan pandangan Supriyadi & Hartati (2022) yang menekankan bahwa partisipasi aktif hanya dapat tumbuh apabila masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, aparat desa tidak hanya berfungsi sebagai pemberi instruksi, melainkan juga memberi teladan dengan ikut turun langsung dalam kerja bakti. Keteladanan ini membangun legitimasi moral sekaligus meningkatkan motivasi warga untuk terlibat aktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Sari (2022) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa menjadi faktor kunci dalam menjaga semangat gotong royong di tengah tantangan modernisasi. Peran pemerintah desa juga semakin diperkuat melalui kolaborasi dengan tokoh adat dan lembaga lokal, yang mampu memberikan legitimasi sosial dan mobilisasi warga. Arnstein (2019) menegaskan bahwa legitimasi sosial merupakan unsur penting untuk memastikan keberlanjutan partisipasi publik, khususnya dalam masyarakat desa.

Pemerintah desa bahkan memanfaatkan teknologi, seperti grup WhatsApp, untuk menyebarkan informasi dan mengingatkan jadwal kerja bakti. Meski efektif, teknologi tetap perlu diimbangi dengan interaksi tatap muka agar ikatan emosional tidak melemah (Eliyani, 2023). Jika ditinjau dari teori perubahan sosial Soekanto (2020), strategi yang dilakukan pemerintah desa mencerminkan bentuk adaptasi dalam menghadapi pergeseran nilai akibat modernisasi. Namun, partisipasi generasi muda masih rendah, karena mereka lebih berorientasi pada aktivitas ekonomi maupun ruang digital (Rifaldi, Hidayatissalam, & Turnip, 2023). Di samping pendekatan formal, pemerintah desa juga mengedepankan komunikasi persuasif dengan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok lokal untuk membangun rasa kebersamaan dan kepemilikan bersama terhadap kegiatan gotong royong. Selain itu, penghargaan simbolis berupa piagam, hadiah sederhana, maupun apresiasi publik pada momen tertentu—misalnya peringatan Hari Kemerdekaan dan HUT Desa—diberikan sebagai bentuk pengakuan. Menurut Pamungkas, Isawati, & Yuniyanto (2022), penghargaan sosial seperti ini mampu menumbuhkan kebanggaan kolektif dan meningkatkan keterikatan warga terhadap nilai gotong royong. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai aktor sosial-kultural yang adaptif dan inovatif dalam mempertahankan budaya gotong royong.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Budaya Gotong Royong serta Upaya Pemerintah Desa dalam Mengatasinya

Perubahan budaya gotong royong di Desa Hiligara dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap partisipasi dan keberlanjutan praktik sosial ini. Faktor ekonomi menjadi salah satu yang paling menonjol, sebab banyak warga bekerja di luar desa atau menjalani pekerjaan harian yang menyita waktu, sehingga sulit melibatkan diri dalam kerja bakti. Putri (2021) menekankan bahwa ketersediaan waktu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sehingga partisipasi sosial sering kali terabaikan. Selain faktor ekonomi, pengaruh teknologi juga signifikan. Media sosial memang mempermudah koordinasi, tetapi sekaligus mengurangi intensitas interaksi tatap muka yang selama ini menjadi dasar kedekatan emosional masyarakat desa. Marhayati (2021) menyoroti bahwa generasi muda lebih banyak menghabiskan waktu pada aktivitas digital, sehingga keterlibatan dalam kegiatan tradisional seperti gotong royong semakin berkurang. Faktor migrasi dan urbanisasi juga berkontribusi pada menurunnya partisipasi, sebab banyak pemuda yang pindah ke kota untuk bekerja atau menempuh pendidikan, sehingga desa kehilangan tenaga produktif. Sari & Hidayat (2023) menegaskan bahwa urbanisasi membawa nilai individualistik yang sering kali melemahkan solidaritas sosial.

Selain itu, perubahan demografi berupa meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia juga membatasi tenaga kerja fisik dalam kerja bakti. Pamungkas et al. (2022) menunjukkan bahwa lansia cenderung memiliki keterbatasan dalam partisipasi sosial yang menuntut tenaga. Faktor budaya lokal juga tidak luput dari pengaruh globalisasi. Generasi muda mulai kurang tertarik dengan tradisi gotong royong, sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat (2020) bahwa globalisasi berpotensi melemahkan nilai lokal jika tidak diimbangi dengan pelestarian. Dari

perspektif teori, Soekanto (2020) menilai fenomena ini sebagai konsekuensi modernisasi yang menggeser nilai tradisional ke arah nilai praktis. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Durkheim tentang pergeseran dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik, di mana ikatan sosial masyarakat digantikan oleh kepentingan ekonomi. Pandangan Giddens (2020) mengenai disembedding turut relevan, yakni keterputusan tradisi lokal akibat penetrasi sistem global. Meskipun faktor ekonomi dan migrasi menjadi penyebab dominan, teknologi dan budaya luar mempercepat luntarnya nilai gotong royong. Pemerintah desa berupaya mengatasi hal ini dengan strategi adaptif, antara lain penjadwalan kerja bakti yang fleksibel, pemberian insentif, melibatkan warga perantau, dan integrasi gotong royong ke dalam program pembangunan. Upaya lain mencakup pendidikan budaya melalui sekolah, karang taruna, serta kampanye digital untuk menanamkan kembali nilai kebersamaan (Tim Jurnal Kewarganegaraan, 2023). Strategi-strategi ini penting agar gotong royong tetap relevan dan dapat diwariskan lintas generasi di tengah perubahan zaman.

Upaya Pemerintah Desa dalam Mempertahankan Budaya Gotong Royong

Upaya pemerintah desa dalam mempertahankan budaya gotong royong di Desa Hiligara difokuskan pada penerapan langkah-langkah praktis yang relevan dengan tantangan sosial, ekonomi, dan demografi. Musyawarah desa dilaksanakan secara rutin untuk merumuskan jadwal kerja bakti dan jenis kegiatan yang akan dilakukan. Hidayat & Sari (2022) menegaskan bahwa musyawarah yang melibatkan masyarakat secara langsung mampu meningkatkan rasa kepemilikan sehingga partisipasi warga meningkat. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan insentif berupa konsumsi, dukungan logistik, serta penghargaan simbolis. Walaupun motivasi utama gotong royong adalah nilai kebersamaan, Pamungkas et al. (2022) menjelaskan bahwa insentif memiliki pengaruh penting dalam menjaga antusiasme partisipasi. Pemanfaatan media sosial juga diterapkan, khususnya melalui grup WhatsApp, untuk menyampaikan informasi dan mengingatkan warga mengenai jadwal kegiatan. Namun, sebagaimana ditegaskan Nugroho & Lestari (2023), interaksi digital tetap harus diimbangi dengan komunikasi tatap muka agar ikatan sosial tetap kuat.

Pemerintah desa juga menggandeng tokoh adat, tokoh agama, serta karang taruna dalam setiap kegiatan. Kolaborasi ini memperluas basis partisipasi sekaligus menjadi sarana pendidikan budaya bagi generasi muda (Armadella, 2022). Gotong royong diintegrasikan dengan program pembangunan desa, seperti perbaikan jalan, kebersihan lingkungan, dan pembangunan fasilitas umum. Dengan demikian, gotong royong bukan lagi sekadar tradisi sosial, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan (Kurniasih, 2023). Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mempertahankan nilai tradisional, tetapi juga menyesuaikannya dengan tuntutan modernisasi. Sejalan dengan pandangan Durkheim, solidaritas sosial dapat terus dipelihara jika nilai kolektif diadaptasikan ke dalam konteks sosial yang baru. Meskipun demikian, rendahnya partisipasi generasi muda tetap menjadi tantangan, sehingga diperlukan inovasi lanjutan berupa pendidikan budaya, pemberdayaan karang taruna, serta kampanye digital yang menekankan pentingnya gotong royong sebagai identitas sosial masyarakat Desa Hiligara.

Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi yang luas, baik pada ranah teoritis, praktis, maupun kebijakan. Secara umum, penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam partisipasi gotong royong akibat faktor ekonomi, migrasi, teknologi, dan demografi. Namun, pemerintah desa mampu menunjukkan strategi adaptif melalui musyawarah, kolaborasi, pemberian insentif, serta pemanfaatan teknologi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai pelestarian budaya gotong royong di tengah modernisasi. Peran pemerintah desa yang mengedepankan pendekatan partisipatif, keteladanan, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi membuktikan relevansinya dengan konsep kepemimpinan partisipatif dan community development (Iswanto, 2021). Penelitian ini juga menambahkan dimensi baru dengan menyoroti faktor migrasi, urbanisasi, dan demografi sebagai variabel penting yang memengaruhi keberlanjutan gotong royong, sekaligus memperluas kerangka analisis teori perubahan sosial Soekanto (2020) dan mendukung pandangan Durkheim maupun Giddens.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arahan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lokal dalam merancang strategi pelestarian budaya gotong royong. Rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain penyusunan regulasi desa yang mengatur kewajiban kerja bakti, pengalokasian dana khusus untuk mendukung kegiatan sosial, serta penguatan peran lembaga lokal seperti PKK, LPM, dan Karang Taruna. Selain itu, pemanfaatan

teknologi harus dilakukan secara bijak agar tetap sejalan dengan interaksi tatap muka. Strategi lain adalah merancang program khusus bagi generasi muda dan perantau, mengingat rendahnya tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan gotong royong (Pamungkas et al., 2022).

Pada tataran kebijakan, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah penguatan nilai lokal. Pemerintah kabupaten dapat mereplikasi model partisipasi Desa Hiligara ke desa lain, serta menyusun regulasi daerah yang mengharuskan setiap desa memiliki aturan terkait gotong royong. Integrasi kegiatan gotong royong ke dalam program pembangunan infrastruktur dan lingkungan menjadi penting, sehingga gotong royong tidak hanya dianggap tradisi, tetapi juga instrumen pembangunan. Lebih jauh, pemerintah dapat membuat program tahunan "Pulang Kampung Gotong Royong" untuk mengundang partisipasi warga perantau. Kebijakan mitigasi dampak migrasi dan urbanisasi juga perlu disiapkan, misalnya melalui pemberdayaan kelompok produktif desa atau program padat karya. Semua kebijakan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi (Rahman & Wijaya, 2022).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa budaya gotong royong di Desa Hiligara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, masih bertahan meskipun mengalami transformasi signifikan akibat faktor ekonomi, migrasi, urbanisasi, teknologi, dan perubahan demografi. Partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya hilang, melainkan bersifat selektif sesuai relevansi kegiatan dengan kebutuhan kolektif. Dalam konteks ini, pemerintah desa tampil sebagai aktor utama yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus penggerak sosial-kultural. Strategi yang dilakukan pemerintah desa, seperti pelaksanaan musyawarah, pemberian insentif, kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga lokal, pemanfaatan teknologi, serta integrasi gotong royong ke dalam program pembangunan desa, menunjukkan bentuk adaptasi terhadap dinamika modernisasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori perubahan sosial Soekanto (2020), pandangan Durkheim tentang solidaritas sosial, serta konsep disembedding Giddens yang menyoroti keterputusan tradisi lokal akibat globalisasi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana tentang kepemimpinan partisipatif dan pembangunan berbasis komunitas, dengan menambahkan variabel migrasi, urbanisasi, dan demografi sebagai faktor penting dalam keberlangsungan budaya lokal. Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang lebih responsif, mulai dari regulasi desa, alokasi pendanaan khusus, hingga strategi pelibatan generasi muda dan perantau. Sementara pada level kebijakan, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang program berbasis nilai lokal yang dapat direplikasi ke desa-desa lain. Dengan demikian, gotong royong tidak hanya dipahami sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai modal sosial yang adaptif dan strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat serta mendukung pembangunan desa berkelanjutan di tengah tantangan modernisasi.

E. Referensi

- Afrianto, W., Rahman, I., Zuknilarinta, D., & Martha, A. (2023). Pemahaman dan Ruang Lingkup Budaya dalam Kepemimpinan Pendidikan Global Berbasis Nilai Kultural. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29219–29225.
- Ammar, M. N. (2023). Pluralisme Budaya dalam Masyarakat Kontemporer: Pendekatan Interdisipliner terhadap Keragaman Kultural. *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 1(2).
- Arief, M. I., & Yuwanto, L. (2023). Gotong Royong sebagai Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau dari Teori Nilai (Basic Human Values Theory). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(2), 490–497.
- Armadella. (2022). Nilai Gotong Royong dalam Upacara Begawi Adat Cakak Pepadun di Kampung Negeri Sakti. *OASE: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 28–38.
- Aulia, N. (2023). Lunturnya Budaya Gotong Royong: Tantangan Era Modern untuk Bangsa. *Kompasiana*.
- Bournen, P. J. Definisi Desa Menurut Para Ahli. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/21/080000969/definisi-desa-menurut-para-ahli>

- Eliyani, F. (2023). Dinamika Budaya dan Pengaruh Teknologi dalam Transformasi Masyarakat Kontemporer. *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 153–166.
- Fusnika, Agnesia H., & Mia A. C. (2022). Implementasi Nilai Gotong Royong dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Jurnal PEKAN*, 7(1).
- Hamid, L. O. M. I. B., Zuriyati, & Iskandar, I. (2023). Systemic Literature Review: Makna Budaya di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29219–29225.
- Harmanto, G., & Hartono, R. (2020). Kamus Geografi. *KOMPAS.com*
- Hayati, K. R., Darmawan, A. B., Putri, H. M., & Faza, I. A. (2023). Implementasi Nilai Gotong-Royong Dalam Kehidupan Bermasyarakat di Perum YKP Pandugo II. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 978–983.
- HIMA PKN FIS UNNES. (2023). Penerapan Nilai Gotong Royong dalam Penguatan Solidaritas Sosial. Universitas Negeri Semarang Repository.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Imam, G. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia (Kemendesa PDTT). (2023). Laporan pembangunan desa berkelanjutan. Kemendesa PDTT.
- Iswanto, B. (2021). Modal Sosial dan Revitalisasi Budaya Gotong Royong di Era Modernisasi Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 32–45. <https://doi.org/10.22146/jsp.61234>
- Kartohadikusumo, S. Definisi Desa Menurut Para Ahli. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/21/080000969/definisi-desa-menurut-para-ahli>
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
- Kurniasih, D. (2023). Efektivitas Tugas Pokok Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat (JPPM)*, 5(2), 101-115.
- Lase, Y. M. (2021). Perubahan Sosial dan Budaya Gotong Royong di Era Modernisasi pada Masyarakat Nias. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 134-142.
- Lestari, A., & Wahyudi, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa: Peran Strategis Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 11(1), 33-40.
- Marhayati, N. (2021). Internalisasi Budaya Gotong Royong Sebagai Identitas Nasional. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(1), 21–42.
- Maulida, R. (2023). Implementasi Budaya Gotong Royong dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila di Era Modern. *Nusantara Journal of Professional and Cultural Studies*, 1(1), 15–25.
- Nugroho, S. A., & Lestari, M. D. (2023). Peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 45–57.
- Nurmitasari. (2024). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Ilan Batu Uru Kecamatan Walenrang Barat Kabupaten Luwu. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2).
- Pahriah, P., Samsuri, T., Sukroyanti, B. A., & Sutajaya, M. (2023). The Implications of Begawe Tradition on Strengthening the Value of Gotong Royong in the Sasak Community, Indonesia. *Path of Science*, 10(10), 4001–4011.
- Pamungkas, S. K., Isawati, & Yuniyanto, T. (2022). Gotong Royong dalam Memperkuat Partisipasi Warga Negara (Civic Engagement). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(6), 4624–4634.
- Pebriani, A., Ramadhan, R. K., & Purwitasari, A. (2023). Identitas Budaya dalam Konteks Perubahan Sosial. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial*, 2(1), 235–242.
- Putri, D. A. (2021). Pengelolaan Sumber Daya oleh Pemerintah untuk Kepentingan Publik. *Sosiohumaniora*, 23(1), 45-53. <https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/34567>
- Rahman, M. T., & Wijaya, H. (2022). Desentralisasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 13(3), 210-225. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/12345>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Riendy, Y., Suyadi, A., & Adriyan. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Desa Rawakalong. *Bakti Hukum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Rifaldi, M. N., Hidayatissalam, A. S., & Turnip, K. D. (2023). Lunturnya Nilai Gotong Royong di Era Globalisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2(1), 1–10.
- Samaun. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 1(1).
- Sari, N. P., & Hidayat, T. (2023). Revitalisasi nilai gotong royong dalam masyarakat desa di era modernisasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 33–45.
- Siddiq, R. (2024). Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri dan Fungsi. Diakses dari <https://wonoyoso.kec-kuwarasan.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/740>
- Siregar, B., & Lubis, A. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengendalian Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 123-130. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jurnalpemberdayaan/article/view/31245>
- Soekanto, S. (2020). *Sosiologi: Suatu pengantar (Cetakan ke-50)*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Supriyadi, & Hartati. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Desa di Era Otonomi dan Digitalisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suryanto, S. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan*. Prenadamedia Group.
- Suryono, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa dalam Melestarikan Budaya Lokal di Era Globalisasi. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan*, 6(1), 55-66.
- Tim Jurnal Kewarganegaraan. (2023). Peran Pendidikan dalam Menanamkan Nilai Gotong Royong Berdasarkan Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.